



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 48/II/TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Bupati Tana Toraja yang terarah, terpadu, terprogram dan sesuai prioritas, perlu disusun perencanaan penyusunan peraturan bupati dalam program pembentukan peraturan bupati;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 4);
 7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi perangkat daerah atau unit kerja dalam menyusun rancangan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

- KETIGA : Penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Tempat;
3. Direktur RSUD Lakipadada di Makale;
4. Para Kepala Bagian Lingkup Setda di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR 48/II/TAHUN 2026
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TAHUN
 ANGGARAN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	INSTANSI TERKAIT	KET
			BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang, bagi hasil pajak dan retribusi dari APBD Kabupaten Tana Toraja kepada lembang Tahun Anggaran 2026	Mengatur Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang dari APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026	√	-	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP 43 Tahun 2014	DPML	
2	Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, tunjangan pemerintah lembang dan BPL, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, THR, Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun Anggaran 2026	Mengatur Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, BPL, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun Anggaran 2026	√	-	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP 43 Tahun 2014	DPML	
3	Tunjangan THR dan Gaji Ketigabelas yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026	Mengatur terkait Tunjangan THR dan Gaji Ketigabelas yang bersumber dari APBD	√	-	Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2023	BPKPD	
4	RKPD Tahun 2027	a. Pendahuluan b. Gambaran Umum Kondisi Daerah c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah g. Penutup	√	-	Permendagri 86 Tahun 2017	Semua OPD	
5	Perubahan RKPD Tahun 2026	a. Pendahuluan b. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 Trw. II c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah e. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan RKPD f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah g. Penutup	-	√	Permendagri 86 Tahun 2017	Semua OPD	
6	Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029	Mengatur mengenai Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029	√	-	Perpres Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan	DP3AP2KB	
7	Penanggulangan Tuberculosis	Pengaturan mengenai penanggulangan tuberculosis di fasilitas layanan kesehatan	√	-	Perturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis	Dinas Kesehatan	


8	Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penaturan mengenai Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	√	-	Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	
9	Transaksi Non Tunai Lembang	Pengaturan mengenai Transaksi Non Tunai Lembang	√	-	Instruksi Bupati Tana Toraja Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	
10	Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Buisun	Pengaturan mengenai Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Buisun	√	-	Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum	Bagian Perekonomian dan SDA Setda dan Perusahaan Umum Daerah Tirta Buisun	
11	Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas	Pengaturan mengenai Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Buisun	Bagian Perekonomian dan SDA Setda dan Perusahaan Umum Daerah Tirta Buisun	
12	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026	Pengaturan terkait Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	√	-	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD, Bag. Organisasi , BKPSDM	
13	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	Mengatur Terkait Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	√	-	Pemendagri 77 Tahun 2020	BPKPD	
14	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	Mengatur Terkait Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	√	-	Pemendagri 77 Tahun 2020	BPKPD	
15	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2027	Mengatur Terkait Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2027	√	-	Pemendagri 77 Tahun 2020	BPKPD	
16	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	√	-	Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Keakyaan Penyelenggaran Negara	BKPSDM, Inspektorat Daerah	
17	Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	- Kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas poengelolaan keuangan daerah	√	-	- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat Daerah, BPKPD	

		- Strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pengendalian			- Peraturan Daerah Kabupaten tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan daerah	
18	Rencana Umum Penanaman Modal	Pengaturan mengenai Rencana Umum Penanaman Modal	√	-	Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal	DMPTSP
19	Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027	Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan yang digunakan dalam perencanaan dan Pelaksanaan APBD TA 2027	√	-	- Pemendagri No 90 Tahun 2019 - Pemenkeu No. 83/ PMK 02/2022 - Pemendagri No. 77 Tahun 2020 - Pemendagri No. 84 Tahun 2022	BPKPD
20	Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Labkesda	Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Labkesda	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, dan Bagian Ortala
21	Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Puskesmas	Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Puskesmas	√	-	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024	Dinas Kesehatan, dan Bagian Ortala
22	Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Persampahan	Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Persampahan	√	-	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023	DLH dan Bagian Ortala
23	Perubahan Atas Perbup Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Upt Rsud Lakipadada Pada Dinas Kesehatan	Pengaturan mengenai Perubahan Atas Perbup Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Upt Rsud Lakipadada Pada Dinas Kesehatan	-	√	Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	RSUD Lakipadada dan Bagian Ortala
24	Pedoman Pelaksanaan BLUD RSUD Lakipadada	Pengaturan mengenai Pedoman Pelaksanaan BLUD RSUD Lakipadada	√	-	Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	RSUD Lakipadada
25	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan BLUD Puskesmas	Mengatur secara rinci tentang Pembentukan, tugas, wewenang, tanggung jawab serta tata kerja dewan pengawas BLUD Puskesmas	√	-	Pasal 22 ayat (1) Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan
26	Penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD	Pengaturan mengenai Penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD	√	-	Pasal 64 ayat (3) Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan
27	Tata cara kerja sama BLUD Puskesmas dengan pihak lain	Pengaturan mengenai Tata cara kerja sama BLUD Puskesmas dengan pihak lain	√	-	Pasal 91 ayat (6) Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan
28	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial
29	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2030	Pengaturan mengenai Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2030	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2030	Dinas Pariwisata

30	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek	Pengaturan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek sebagai dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang serta mendorong pembangunan berkelanjutan	√	-	Perda Kab. Tana Toraja tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja	Dinas PUTR dan perangkat daerah terkait	
31	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Makale	Pengaturan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek sebagai dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang serta mendorong pembangunan berkelanjutan	√	-	Perda Kab. Tana Toraja tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja	Dinas PUTR dan perangkat daerah terkait	
32	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Makale Utara	Pengaturan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek sebagai dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang serta mendorong pembangunan berkelanjutan	√	-	Perda Kab. Tana Toraja tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja	Dinas PUTR dan perangkat daerah terkait	
33	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bittuang	Pengaturan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek sebagai dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang serta mendorong pembangunan berkelanjutan	√	-	Perda Kab. Tana Toraja tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja	Dinas PUTR dan perangkat daerah terkait	
34	Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja	Pengaturan mengenai Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja	√	-	Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	
35	Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tana Toraja	Pengaturan mengenai Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tana Toraja dan pemetaan daerah rawan bencana	√	-	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	BPBD dan perangkat daerah terkait	
36	Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal tata kelola persandian, manajemen SDM persandian, hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, pengelolaan informasi berkalsifikasi, operasional persandian dan movev persandian	√	-	Peraturan BSSN nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Diskominfosan	
37	Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Pedoman atau Kebijakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan keamanan informasi pada instansi pemerintah maupun sektor publik dan swasta	√	-	Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfosan	
38	Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah	Kebijakan Pemda dalam penyelenggaraan statistik sektoral terkait prinsip dasar, standar, prosedur dan kriteria	√	-	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara	Diskominfosan	
39	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sangalla' pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sangalla' pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	√	-	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, dan Bagian Ortala	

40	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pangan	√	-	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bagian Ortala	
41	Lembaga Kemasyarakatan Lembang/Kelurahan	Persyaratan pembentukan rukun tetangga di bawah wilayah lingkungan dan kelurahan	√	-	Permendagri Nomor 18 Tahun 2028 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	DPML dan Bagian Pemerintahan	
42	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla'	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla'	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
43	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla' Utara	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla' Utara	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
44	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla' Selatan	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla' Selatan	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
45	Peta Batas Lembang Lea Kecamatan Makale	Peta Batas Lembang Lea Kecamatan Makale	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
46	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Makale Selatan	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Makale Selatan	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
47	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Mengkendek	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Mengkendek	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
48	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Gandangbatu Sillanan	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Gandangbatu Sillanan	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
49	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rantetayo	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rantetayo	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
50	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Kurra	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Kurra	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
51	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rembon	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rembon	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
52	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Malimbong Balepe'	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Malimbong Balepe'	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
53	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Saluputti	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Saluputti	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
54	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Bittuang	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Bittuang	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	

55	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Masanda	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Masanda	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
56	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rano	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rano	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
57	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Bonggakaradeng	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Bonggakaradeng	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
58	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Simbuang	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Simbuang	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
59	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Mappak	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Mappak	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	



 BUPATI TANA TORAJA,
 ZADRAK TOMBEG